



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN LUBUK BAJA



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Kecamatan Lubuk Baja dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP mempedomani PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara Substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

LKjIP Kecamatan Lubuk Baja disampaikan kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam sebagai bentuk Akuntabilitas Vertikal selain itu LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Lubuk Baja sebagai peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Isi LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2021-2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan Kecamatan Lubuk Baja untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.



Camat Lubuk Baja Kota Batam

Sti Miranthy Adisthy, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19850923 200312 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. . Latar Belakang	1
B. . Data Umum Organisasi dan Tata Kerja	3
C. . Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	18
D. . Landasan Hukum	20
E. . Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. . Rencana Strategis	23
B. . Rencana Kinerja	27
C. . Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. . Capaian Kinerja	41
B. . Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP.....	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik "*good and service*" disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaik disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik) Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*aligment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Perlu diperhatikan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar Akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab administrasi pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali “controllableactivities” dengan kegiatan yang tidak terkendali “uncontrollable activities”. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Artinya kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu atas Pelaporan Kinerja instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKJIP

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKJIP Tahun 2024 berdasarkan Indikator (Input, Output, Outcomes, dan Benefits) juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja yang menjadi laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan oleh camat kepada walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKJIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2024.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, maka Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- **Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang;
2. Menyelenggarakan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
3. Merumuskan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
4. Membina organisasi dan aparatur kelurahan;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
6. Melakukan pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di kelurahan;

7. Menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 9. Melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 10. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup tugasnya;
 11. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkup tugasnya;
 12. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugasnya;
 13. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dalam lingkup tugasnya;
 14. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam lingkup tugasnya;
 15. Membina penyelenggaraan kelurahan;
 16. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan;
 17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Sekretaris Camat
Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan perencanaan, tata laksana, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
 1. Menghimpun dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program, ketatausahaan dan urusan rumah tangga kecamatan;
 2. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana kecamatan;
 3. Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;

4. Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana-rencana program dan kegiatan kecamatan;
6. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Kecamatan membawahi:

(1) Subbagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun bahan laporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan penyelarasan dan kompilasi rencana anggaran Kecamatan;
- Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan aset Kecamatan;
- Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan Kecamatan;
- Melaksanakan administrasi gaji pegawai lingkup Kecamatan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan penyusunan rencana program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan, hukum, kehumasan dan urusan umum lainnya;
- Melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

• Seksi Pemerintahan

Dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang pemerintahan;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
3. Menghimpun dan menginventarisir tugas-tugas, tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah di kecamatan;

4. Mempersiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan kecamatan lingkup tugas pemerintahan;
 5. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya .
- **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

 1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang ketentraman dan ketertiban;
 2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. Menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban umum di Kecamatan;
 4. Melakukan koordinasi antary instansi terkait;
 5. Menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang meliputi patroli wilayah kecamatan;
 6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan ;
 7. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 - **Seksi Pelayanan Umum**

Dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

 1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang pelayanan umum;

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan umum;
 3. Menyelenggarakan pelayanan umum di kecamatan;
 4. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan umum di kecamatan;
 5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan pelayanan umum di Kecamatan;
 7. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- Seksi Kesejahteraan Rakyat

Dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan urusan kesejahteraan rakyat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

 1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang kesejahteraan rakyat;
 2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang meliputi pembinaan dan peningkatan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup kecamatan;
 3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data lingkup kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial;
 4. Melaksanakan pemantauan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan bantuan sosial lingkup kecamatan;
 5. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan bantuan sosial di kecamatan;
 6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

7. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di kecamatan;
8. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang kepala, mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta urusan lainnya yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja kecamatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, pengendalian, pengawasan, pendataan, penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan mengidentifikasi data-data pembangunan dan pemberdayaan kelurahan, masyarakat miskin serta kelembagaan masyarakat;
4. Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lingkup kecamatan;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
6. Melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lingkup kecamatan;
7. Melaksanakan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun bahan laporan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;

10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

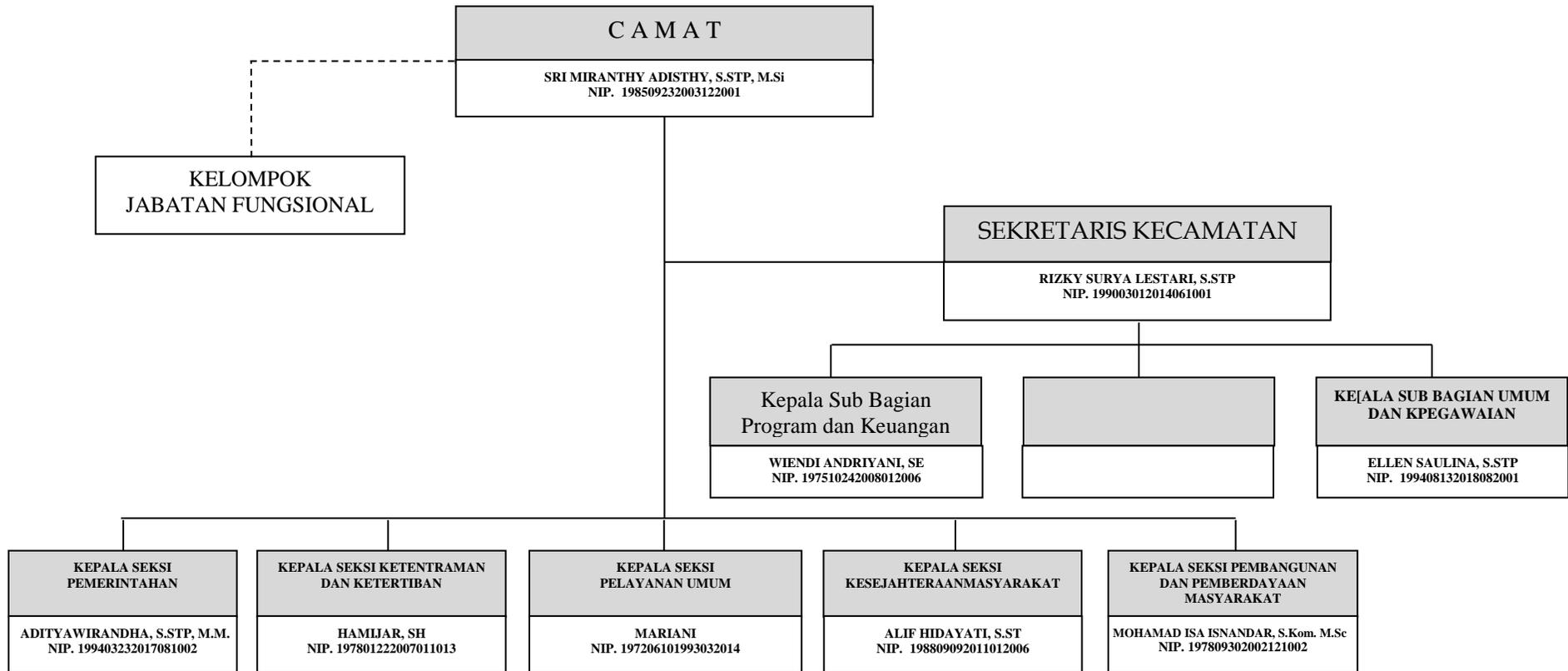
b. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Baja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 14 Nopember 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang uraian tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Perda Kota Batam

Nomor : 13 Tahun 2007

Tanggal : 14 Nopember 2007



Secara rinci Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Baja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Lubuk Baja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan didukung dan dipengaruhi oleh beberapa aspek-aspek strategis yang merupakan potensi sumber daya maupun aset yang dimiliki.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lubuk Baja didukung oleh personil Kelurahan dan Kecamatan pada tahun 2024 sebanyak 76 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 44 orang, PPPK sebanyak 10 Orang dan THD/THL sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pangkat/Golongan

NO	KANTOR CAMAT/ KELURAHAN	PNS/GOLONGAN																VII	IX	JUMLAH
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d			
1	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	1	4	1	1	-	-	6	4	24
2	Baloi Indah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	7
3	Tanjung Uma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	6
4	Lubuk Baja Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	5
5	Kampung Pelita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	6
6	Batu Selicin	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	2	2	2	8	10	18	1	1	0	0	6	4	54

Sumber : Kecamatan Lubuk Baja

Tabel 1.2
**JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN LUBUK BAJA
 MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	KET
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2		
01	CAMAT	-	-	-	-	-	1	1	Eselon III.a
02	SEKRETARIS KECAMATAN	-	-	-	-	1	-	1	Eselon III.b
03	KASI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	1	1	Eselon IV.a
04	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	-	-	-	-	1	-	1	Eselon IV.a
05	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	1	-	1	Eselon IV.a
06	KASI PELAYANAN UMUM	-	-	1	-	-	-	1	Eselon IV.a
07	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	1	1	Eselon IV.a
08	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	1	Eselon IV.b
09	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	-	-	-	1	-	1	Eselon IV.b
10	STAF KECAMATAN	-	-	3	6	4	-	13	PNS/PPK
11	LURAH	-	-	-	-	4	1	5	Eselon IV.a
12	SEKLUR	-	-	-	-	5	-	5	Eselon IV.b

NO	URAIAN	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	KET
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2		
13	KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM KELURAHAN	-	-	-	-	5	-	5	Eselon IV.b
14	KASI KETERTIBAN UMUM KELURAHAN	-	-	-	-	4	1	5	Eselon IV.b
15	KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	1	2	2	-	5	Eselon IV.b
16	STAF KELURAHAN	-	-	3	1	3	-	7	PNS/PPK
17	STAF THD/HONOR KELURAHAN	1	-	10	-	-	-	11	THD
18	STAF THD / HONOR KECAMATAN	-	-	5	-	6	-	11	THD
JUMLAH		1	0	23	9	38	5	76	

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Pegawai Negei Sipil (PNS) di Kecamatan Lubuk Baja banyak golongan III dengan tingkat pendidikan SLTA dan S1. Mengingat tuntutan akan ilmu dan memperkuat barisan dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Lubuk Baja maka Pegawai Negeri Sipil dengan semangat untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi hal ini akan berpengaruh terhadap kualifikasi jenjang kepangkatan.

d. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam per 31 Desember 2024 terlampir.

C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Kecamatan Lubuk Baja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam. Kecamatan Lubuk Baja berupaya mempersiapkan langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam Rencana Kerja (RENJA) untuk kegiatan pembangunan tahunan dalam rangka meningkatnya taraf hidup masyarakat melalui kegiatan Pelayanan kemasyarakatan dan mengacu pada Visi Kota Batam :

“Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern Dan Sejahtera “

Kecamatan Lubuk Baja harus mendukung secara penuh visi dan misi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam sehingga Kecamatan Lubuk Baja diharapkan mampu untuk menyumbang andil dalam pencapaian visi dan misi tersebut, maka maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Untuk memberikan berbagai informasi dan gambaran umum tentang Kecamatan, peran fungsi kecamatan dan permasalahan yang dihadapi;
- b. Untuk mengadakan sebagian wewenang walikota sebagaimana tercantum dalam pelimpahan wewenang dari walikota ke camat;
- c. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Lubuk Baja sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota;

- d. Mengamankan dan melaksanakan secara aktif segala Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan memperhatikan potensi wilayah yang tersedia;
 - e. Untuk mensinkronkan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Kota Batam Tahun 2021-2026;
 - f. Untuk mengawasi pemerintahan dibawahnya (Kelurahan).
2. Tujuan
- a. Memberikan Pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien;
 - b. Sebagai wadah/tempat pelayanan masyarakat terdepan setelah Pemerintah Kelurahan;
 - c. Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya masyarakat perkotaan maupun hinterland yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh;
 - d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan harkat masyarakat perkotaan dan hinterland dengan menggali nilai seni dan budaya yang berkembang dimasyarakat serta pembinaan olah raga;
 - e. Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan perdagangan dan industri yang berteknologi maju;
 - f. Sebagai wadah feedback bagi pemerintah kelurahan maupun masyarakat setempat.

Selanjutnya perubahan status Batam dari Kotamadya Administratif menjadi Kota Batam, sebagaimana ditetapkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Kecamatan Lubuk Baja merupakan salah satu Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan yang ada di Kota Batam. Kecamatan Lubuk Baja diresmikan pada tanggal 3 Juni 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pemekaran, Perubahan, Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Batam. Dimana Pemekaran Kecamatan Sekupang merupakan salah satu dari bagian Kecamatan yang dimekarkan di Kota Batam ini dan Kecamatan Sekupang sebagai Kecamatan Induk yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu kecamatan Sekupang dan Kecamatan Lubuk Baja. Dengan demikian Kecamatan Lubuk Baja merupakan Satuan Kerja yang yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Batam.

Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Baloi Indah
2. Kelurahan Tanjung Uma
3. Kelurahan Lubuk Baja Kota
4. Kelurahan Kampung Pelita
5. Kelurahan Batu Selicin

Tujuan dari pelaksanaan pemekaran Kecamatan dan kelurahan ini yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang disejalankan dengan upaya memperpendek rentang kendali secara organisasi pemerintahan dan juga upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengacu pada SPP (Standartd Pelayanan Publik) yang meliputi antara lain : syarat – syarat, lama waktu proses, serta pembiayaan yang di tampilkan dalam bentuk papan informasi untuk diketahui secara umum dengan mengedepankan aspek transparansi, objektif, standard, partisipasi kesetaraan, daya tanggap, pengawasan, efisien dan efektifitas serta profesionalisme.

Kecamatan Lubuk Baja secara geografis merupakan daerah perkotaan dan kawasan Perbelanjaan atau Kawasan perekonomian yang terdiri dari Kelurahan Baloi Indah, Kelurahan Tanjung Uma, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kelurahan Kampung Pelita dan Kelurahan Batu Selicin.

Kecamatan Lubuk Baja memiliki potensi yang baik untuk pengembangan Kawasan Perbelanjaan. Pada umumnya pemukiman penduduk heterogen dan sebagian besar bermata pencaharian Swasta dan Wiraswasta. Selain itu Kecamatan Lubuk Baja terdapat beberapa Kantor Pemerintah Kota Batam.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Lubuk Baja dan di kelurahan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan;
2. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.

D. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKJIP Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja dasar Hukum Kecamatan Lubuk Baja untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kota Batam (lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37 seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Nomor 5 seri D) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam;

9. Peraturan Walikota Batam Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Kota Batam Tahun 2006-2011;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 04.A Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dari Walikota Batam kepada Camat;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam.

E. Sistematika Penyajian

Dalam Laporan Akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Tahun 2024. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Dari segi pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan masih sangat terbatas, hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut, dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran.

Capaian kinerja per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, lingkungan strategis organisasi dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Strategik

Menguraikan rencana strategik dan rencana kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Lubuk Baja di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategi yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD Kota Batam. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur pertanggung jawaban camat selaku pembantu kepala daerah pada akhir tahun anggaran.

Kecamatan Lubuk Baja telah menyusun draft rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan di Kecamatan Lubuk Baja, yang menempatkan renstra sebagai komitmen bersama Kecamatan Lubuk Baja beserta seluruh karyawan dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan sebagai pelayan masyarakat.

Proses penyusunan renstra dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kepada tujuan, sasaran dan strategi pemcaaiannya.

1) Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana dan bagaimana Kecamatan Lubuk Baja akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Sebagaimana telah dirumuskan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang, maka visi Kecamatan Lubuk Baja adalah “Terwujudnya Kecamatan Lubuk Baja sebagai institusi yang akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Visi ini merupakan bagian integral dan diharapkan menjadi katalisator untuk tercapainya visi Kota Batam yakni terwujudnya Batam menuju bandar dunia yang madani dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

2) Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi Kecamatan Lubuk Baja sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar pembangunan, yang dapat mendorong peningkatan perekonomian rakyat, kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat.
2. Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh.
3. Menciptakan pelayanan masyarakat yang prima dengan melaksanakan pemerintahan Kecamatan Lubuk Baja yang baik, bersih, transparan dan berwibawa.

3) Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkannya dengana mengaju kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Lubuk Baja mengidentifikasi tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan masyarakat dengan cepat dan lancar di semua bidang.
2. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi maupun kelembagaan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan etos kerja dan kinerja aparatur.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.
6. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kualitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun guna mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran Kecamatan Lubuk Baja diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Ada pun sasaran Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Layanan Masyarakat melalui pembuatan KTP, KK, Kartu Pencari Kerja (Ak 1), dan surat menyurat lainnya.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung dan mensukses program pemerintah.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi maupun kelembagaan pemberdayaan masyarakat melalui diklat, bimtek, dan pelatihan ketrampilan, sosialisasi dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan.
6. Meningkatkan etos kerja dan kinerja melalui pembinaan tugas belajar dan workshop.
7. Meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masyarakat melalui pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
8. Meningkatnya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan event-event.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	55.50%	59.25%	61.75%	64.50%	67.25%	71.25%	71.25%
			Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	80%	82%	87%	90%	92%	95%	95%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.61%	82%	88.31%	89%	90%	91%	91%
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Kecamatan Lubuk Baja mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di dalam suatu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh sasaran strategis, kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Baja kemudian diformulasikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan. Dalam rencana kinerja tahunan diuraikan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Lubuk Baja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan *benchmark* dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Kecamatan Lubuk Baja disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian dikompilasi ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Lubuk Baja (Formulir RKT). Dokumen tersebut menyajikan target kinerja Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024, dan merupakan komitmen penuh dalam mencapai kinerja yang paling maksimal dalam upaya mewujudkan misi Kecamatan Lubuk Baja. Fokus utama dalam penetapan Rencana Kinerja Tahun 2024 adalah alokasi sumber dana dan sumber daya yang dimiliki dan usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

a. Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Penetapan Sasaran Strategis

Kecamatan Lubuk Baja mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin di capai tahun 2024. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang telah ditetapkan, Kecamatan Lubuk Baja merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Lubuk Baja menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

b. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kecamatan Lubuk Baja telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai, juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, termasuk indikator kerjanya beserta target kinerja kuantitatif dalam rangka mencapai kinerja yang paling maksimal dalam bentuk rencana kinerja tahun 2024.

C. Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang sangat penting perlu dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna, untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2024

NO	SASARAN/STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan	92%
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase kegiatan pelayanan publik yang terlaksana	100%
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase usulan Masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan Pembangunan	100%

Untuk pencapaian indikator kinerja diatas akan dilaksanakan melalui program kegiatan sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	1,887,300,560
	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	1,887,300,560
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	117,483,000
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1,769,817,560
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	2,593,020,000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,593,020,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	217,020,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,376,000,000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	601,244,000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	601,244,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	147,320,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	151,590,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	302,334,000
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	12,590,043,550
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	11,171,452,118
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11,171,452,118

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	141,079,500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,774,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50,141,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40,186,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	47,178,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1,800,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	1,143,401,932
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	223,603,740
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	919,798,192
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	134,110,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39,780,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50,520,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26,310,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17,500,000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	2,271,002,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2,271,002,000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	520,685,000
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,539,541,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	210,776,000
KELURAHAN BALOI INDAH			
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	2,271,512,200
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta	89,080,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
		Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	1,959,732,200
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,872,242,200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44,540,000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	291,491,262

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	134,902,750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	121,400,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	152,118,512
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	68,178,800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,939,712
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000
KELURAHAN TANJUNG UMA			
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	3,013,752,780
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	2,701,972,780
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,614,482,780
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	44,540,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	271,076,262
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	134,902,750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	121,400,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	131,703,512
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	47,763,800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,939,712
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000
KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA			
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun	914,126,800

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
		Sesuai Kebutuhan	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	602,346,800

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	203,076,800
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	356,320,000
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	273,073,262
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	134,902,750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	121,400,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	133,700,512
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49,760,800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,939,712
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	3,870,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
		Perizinannya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000
KELURAHAN KAMPUNG PELITA			
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	735,852,920
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	44,540,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
		Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	424,072,920
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	247,502,920
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133,620,000
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	272,373,262
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	134,902,750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	121,400,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	133,000,512
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49,060,800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,939,712

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000
KELURAHAN BATU SELICIN			
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	1,511,679,200
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	1,199,899,200
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,023,329,200
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133,620,000
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	262,339,262
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	134,902,750
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	121,400,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	122,966,512

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39,026,800
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,939,712
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Kecamatan Lubuk Baja yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, skala nilai peringkat kinerja ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini;
- b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	64.50%	95,37%	147.86%	Sangat baik	Kecamatan Lubuk Baja
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90%	98,01%	108,9%	Sangat baik	Kecamatan Lubuk Baja
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	93,41%	103,78%	Sangat baik	Kecamatan Lubuk Baja

	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat baik	Kecamatan Lubuk Baja
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	Sangat baik	Kecamatan Lubuk Baja

Tabel 3.3
Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	61,75%	97,56%	157,99%	64.50%	98,01%	152,71%
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	87%	97,56%	157,99%	90%	98,01%	108,9%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89%	90,55%	104,71%	90%	93,41%	103,78%
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	85,25%	85,25%	100%	95,37%	95,37%
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	95,85%	95,85%	100%	91,44%	91,44%

Tabel 3.4

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2024	Target 2025	Tingkat Kemajuan
Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Jumlah kelurahan yang terlayani dalam pelayanan pengangkutan sampah/Jumlah kelurahan wilayah kecamatan x 100	98,01%	92%	106,53%
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana x 100	95,37%	100%	95,37%
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan APBD/RKPD x 100	91,44%	100%	91,44%

Tabel 3.5

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2024		Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	64.50%	98,01%	152,71%	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah	Melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat dalam pengelolaan sampah
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90%	98,01%	108,9%	Kurangnya anggaran, armada dan tenaga kerja dalam melayani pengangkutan sampah	Menambah anggaran, armada dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	93,41%	103,78%	Belum maksimalnya masyarakat mengetahui informasi pelayanan melalui teknologi informasi	Melakukan kegiatan sosialisasi untuk menginformasikan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	95,37%	95,37%	Kurangnya kejelasan dan pemahaman pegawai dan Masyarakat dalam pelaksanaan prosedur pelayanan	Mengikutkan pegawai bimtek dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai prosedur pelayanan
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	91,44%	91,44%	Anggaran yang tidak cukup untuk mengakomodir usulan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Menggunakan skala prioritas dalam memilih usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tabel 3.6
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja 2024			Anggaran Tahun 2024			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	64.50%	98,01%	152,71%	1.817.261.760	1.663.783.963	95,37%	54,7
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	90%	98,01%	108,9%	1.817.261.760	1.663.783.963	95,37%	10,89
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	93,41%	103,78%	23.688.250.007	21.051.368.262	94.05	9.73
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	95,37%	95,37%	16.800.226.107	15.798.853.929	87,69%	91,94
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	100%	91,44%	91,44%	6.888.023.900	5.252.514.333	92.63	-1,19

Tabel 3.7
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kecamatan Lubuk Baja yang Bersih dan Hijau dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Persentase Pengelolaan Sampah	152,71%				
		Persentase Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	108,9%	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	108,9%	Menunjang
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Baja yang Transparan, Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,78%				
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Proses Pembangunan	Persentase Kegiatan Pelayanan Publik yang terlaksana	95,37%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	95,37%	Menunjang
		Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	91,44%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Persentase RT/RW/LPM aktif; 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	99,33%	Menunjang

				Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; 2. Persentase Warga yang berdaya	88,93%	Menunjang
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	96,10%	Menunjang

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Belanja yang berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi fisik Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai Berikut:

Tabel 3. 8
Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang tidak tuntas	1,817,261,760	1,663,783,963	95%
	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengangkutan Sampah	1,817,261,760	1,663,783,963	95%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	41,057,000	40,800,000	99%
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1,776,204,760	1,622,983,963	91%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase RT/RW/LPM aktif 2. Persentase usulan yang ditindaklanjuti ke forum OPD	3,798,520,000	3,756,715,000	99%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyediaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3,798,520,000	3,756,715,000	99%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	217,020,000	215,715,000	99%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	3,581,500,000	3,541,000,000	99%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Tingkat Kecamatan	di Tingkat Kecamatan			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	601,244,000	593,573,500	99%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	601,244,000	593,573,500	99%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	147,320,000	144,408,000	98%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	151,590,000	150,199,500	99%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	302,334,000	298,966,000	99%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	12,940,785,357	12,294,150,896	88%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	11,600,924,485	11,258,072,790	97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	11,600,924,485	11,258,072,790	97%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
		Tunjangan ASN			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	141,079,500	126,533,600	84%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,774,000	1,541,000	87%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50,141,500	44,104,000	88%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40,186,000	38,373,000	95%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	47,178,000	41,363,600	88%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1,800,000	1,152,000	64%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	1,064,671,372	789,330,806	78%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	253,603,740	215,654,826	85%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	811,067,632	573,675,980	71%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	134,110,000	120,213,700	92%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39,780,000	38,681,000	97%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50,520,000	38,905,700	77%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26,310,000	26,055,000	99%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17,500,000	16,572,000	95%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan	2,460,178,000	2,308,798,800	95%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2,460,178,000	2,308,798,800	95%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Ne	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	520,685,000	506,010,000	97%
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	1,539,541,000	1,428,161,000	93%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	Lokal, Regional, dan Nasional	Lokal, Regional, dan Nasional			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	399,952,000	374,627,800	94%
KELURAHAN BALOI INDAH					
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	2,271,512,200	1,323,570,000	89%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000	303,845,000	97%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000	43,435,000	98%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000	86,870,000	98%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000	43,335,000	97%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000	43,335,000	97%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000	43,435,000	98%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000	43,435,000	98%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	1,959,732,200	1,019,725,000	82%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000	41,805,000	97%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,872,242,200	934,585,000	50%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44,540,000	43,335,000	97%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	294,273,150	248,350,007	61%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	137,902,750	124,709,500	69%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000	-	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750	8,658,500	98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	124,400,000	112,225,000	90%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000	3,826,000	90%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	151,900,400	122,500,107	79%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	68,178,800	39,663,659	58%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,721,600	82,836,448	99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000	1,140,400	36%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000	840,400	22%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000	300,000	50%
KELURAHAN TANJUNG UMA					
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	3,013,752,780	2,860,706,000	96%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000	298,725,000	96%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000	43,375,000	97%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000	84,710,000	95%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000	42,355,000	95%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000	42,355,000	95%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000	43,375,000	97%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000	42,555,000	96%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	2,701,972,780	2,561,981,000	96%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000	41,305,000	96%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,614,482,780	2,477,511,000	95%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44,540,000	43,165,000	97%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	273,858,150	219,550,011	78%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	137,902,750	114,569,500	93%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000	390,000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750	8,252,500	93%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	124,400,000	101,796,000	82%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000	4,131,000	97%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	131,485,400	101,330,511	71%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	47,763,800	24,348,063	51%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,721,600	76,982,448	92%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000	3,650,000	68%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000	3,350,000	87%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000	300,000	50%
KELURAHAN LUBUK BAJA KOTA					
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	914,126,800	888,554,000	97%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000	298,265,000	96%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000	42,555,000	96%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000	85,150,000	96%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	44,540,000	42,555,000	96%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000	43,395,000	97%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000	42,055,000	94%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000	42,555,000	96%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	602,346,800	590,289,000	98%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000	41,805,000	97%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	203,076,800	202,284,000	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	356,320,000	346,200,000	97%
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	275,855,150	241,053,300	67%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	KABUPATEN/KOTA				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	137,902,750	128,177,000	96%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000	384,000	98%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750	8,320,000	94%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	124,400,000	115,322,000	93%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000	4,151,000	97%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	133,482,400	112,376,300	79%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49,760,800	29,825,854	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,721,600	82,550,446	99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000	500,000	28%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000	200,000	5%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000	300,000	50%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
		i			
KELURAHAN KAMPUNG PELITA					
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	735,852,920	654,879,333	93%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000	297,489,000	95%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000	42,039,000	94%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000	85,390,000	96%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000	42,755,000	96%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000	42,375,000	95%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan	44,540,000	42,555,000	96%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000	42,375,000	95%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	424,072,920	357,390,333	90%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000	41,805,000	97%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	247,502,920	185,403,000	75%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133,620,000	130,182,333	97%
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	282,155,150	247,688,189	76%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	137,902,750	134,116,000	97%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000	384,000	98%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750	8,263,000	93%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	124,400,000	121,343,000	98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000	4,126,000	97%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	139,782,400	110,790,689	74%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56,060,800	28,226,241	50%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,721,600	82,564,448	99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	4,470,000	2,781,500	57%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000	2,481,500	64%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000	300,000	50%
KELURAHAN BATU SELICIN					
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Warga yang Berdaya 2. Persentase Sarpras Kelurahan yang Dibangun Sesuai Kebutuhan	1,511,679,200	1,023,206,000	90%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	311,780,000	300,077,000	96%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	44,540,000	42,687,000	96%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	89,080,000	85,180,000	96%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	44,540,000	42,570,000	96%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	44,540,000	43,250,000	97%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	44,540,000	43,140,000	97%
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	44,540,000	43,250,000	97%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dibangun	1,199,899,200	723,129,000	83%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42,950,000	41,805,000	97%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1,023,329,200	551,199,000	54%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	133,620,000	130,125,000	97%
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	273,121,150	239,262,726	76%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	137,902,750	129,417,500	94%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	390,000	390,000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,847,750	7,843,500	89%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	124,400,000	117,137,000	94%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,265,000	4,047,000	95%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	130,748,400	107,063,726	76%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	47,026,800	25,113,278	53%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83,721,600	81,950,448	98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	4,470,000	2,781,500	57%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI AN (%)
	Pemerintahan Daerah	daerah yang layak fungsi			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,870,000	2,481,500	64%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600,000	300,000	50%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atau sasaran strateginya. Sebanyak 50 Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2024 pada hakikatnya berkat limpahan rahmat dan Karunia Allah SWT, serta hasil kerja sama yang baik dari seluruh pegawai Kecamatan Lubuk Baja.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, keselarasan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lubuk Baja ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai alat komunikasi dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah strategis agar tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Baja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih. Semoga segala upaya yang telah dan akan dilakukan dapat mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam upaya mewujudkan *good governance*.



Camat Lubuk Baja Kota Batam

Sri Miranthy Adisthy, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19850923 200312 2 001